

EVALUASI KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DALAM MELAKSANAKAN KETERTIBAN SOSIAL DI KOTA PEKANBARU

Oleh:

Mesi Wahyulianti

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan

Universitas Islam Riau-Indonesia

Correspondence author: mesi@student.uir.ac.id

Abstract

The number of homeless and beggars in the city of Pekanbaru are not all permanent residents of the city of Pekanbaru, but they are migrants from various neighboring areas of the city of Pekanbaru, such as Palembang, Medan, Bukit Tinggi, Padang, Jambi, Aceh and many other areas. The main cause of these homeless and beggars choosing the city of Pekanbaru to vagrancy and beg is because in Pekanbaru the income they make during begging and vagrancy in this city is very much compared to other cities. lack of coordination from the Office of Social Affairs in carrying out policing because based on the opinion of the Head of Social Rehabilitation of the Pekanbaru Social Service said that it does not have the authority to bring order to the sprawl. This type of research is a qualitative descriptive type. Because researchers intend to provide results of analysis and detailed information on the object of the researcher. Then, this is done by collecting data from samples that will represent the population, so that a very clear depiction of the results of the analysis will be obtained. The purpose of this study was to determine how the policy evaluation carried out by the Social Service in carrying out social order in the city of Pekanbaru. The results of this study indicate that it has been sought from the Pekanbaru City Social Institution regarding rehabilitation programs, one of which is providing workshops or the provision of skills from homeless and beggars whose skills are honed to create something valuable for themselves. One of the coaching conducted to foster midfielders and beggars in the city of Pekanbaru is a raid carried out by the social service and a new city police department to reduce the midfielders and beggars in this city.

Keywords: Evaluation, Public Policy and Social Order

PENDAHULUAN

Gelandangan adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal atau kediaman dan pekerjaan yang tetap dan mengembara di tempat umum. Sedangkan Pengemis adalah orang yang mampu secara fisij atau tidak namun memiliki pekerjaan hanya meminta minta dan meraa dikasihani untuk mengharap balas kasihani dari orang lain.

Mereka bukan sepenuhnya penduduk tetap kota pekanbaru melainkan para urban yang datang dari berbagai daerah tetangga kota pekanbaru seperti Padang, Bukit Tinggi, Medan, Aceh dan lain sebagainya, meeka tidak ada pilihan lain selain untuk menjadi gelandangan dan pengemis. Menurut Ahmad (2010:2) adapun yang dimaksud dengan gelandangan dan pengemis atau yang biasa disebut dengan gepeng yang mana tidak hanya menjadi kosa kata umum dalam percakapan sehari-hari dan topik pemberitaan media massa, namun juga sudah menjadi istilah dalam kebijakan pemerintah yang

merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui di kota-kota besar yang tidak memiliki pekerjaan atau tempat tinggal atau disebut juga dengan homeless.

Dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008, Bab III, Pasal 3 dan 4 disebutkan tentang larangan bagi setiap orang yaitu : Pasal 3 ayat 2, dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada Gelandangan dan Pengemis di Jalan Raya, Jalur Hijau, Persimpangan Lampu Merah dan Jembatan Penyebrangan atau di Tempat-tempat Umum. Pasal 4 ayat 1 Setiap Orang atau kelompok dilarang melakukan usaha penampungan, membentuk dan atau mengorganisir Gelandangan dan Pengemis serta mengeksploitas mereka yang bertujuan mencar keuntungan materi semata dengan memanfaatkan mereka. Ayat 2 setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan tempat/bangunan rumah/pertokon/perkantoran untuk digunakan sebagai tempat penampungan gelandangan dan pengemis.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: a.mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam melaksanakan ketertiban sosial di Kota Pekanbaru. b.Mengetahui apa saja hambatan Dinas Sosial dalam melaksanakan ketertiban sosial di Kota Pekanbaru.

Konsep Pemerintahan

Sebagai negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama menyelenggarakan kekuasaan dari Negara.

Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata perintah kemudian mendapat awalan pe- menjadi kata pemerintahan, seperti yang dijelaskan Syafii' dkk (2002:3) berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus negara, serta mendapatkan akhiran-an menjadi kata pemerintahan, berarti perihal, cara, pembuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memilih legitimasi.

Konsep Manajemen Pemerintahan

Menurut Salam (2004:10) Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yang tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektifitas dan efisien. Dengan demikian manajemen melibatkan berbagai elemen organisasi baik internal, eksternal, sarana, pra sarana, alat maupun fungsi dan kedudukan (jabatan) dalam organisasi yang diatur sedemikian rupa dalam mencapai tujuan organisasi.

Konsep Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye dalam Kencana (2007:86) kebijakan pemerintahan adalah "is whatever government choose to do or not to do" adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Dye mengatakan bahwa bila pemerintahan memiliki untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintahan atau pejabat pemerintah saja.

Konsep Ketertiban Sosial

Menurut Friedlander dan Apte dalam Fahrudin (2012:12) fungsi-fungsi ketertiban sosial tersebut adalah: a.Fungsi Pencegahan (preventive) ketertiban sosial ditujukan untuk memperkuat individu,

keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. b.Fungsi Penyembuhan (curative) ketertiban sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. c.Fungsi Pengembangan (development) ketertiban sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam prosen pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat. d.Fungsi Penunjang (supportive) fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan ketertiban sosial.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah tipe kualitatif deskriptif. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek peneliti. Kemudian, hal itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi, sehingga akan diperoleh penggambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau melalui Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dimana instansi tersebut memiliki wewenang dalam melaksanakan Peraturan. Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Adapun Dinas Sosial Kota Pekanbaru, berlokasi di jalan Parit Indah, Kota Pekanbaru. Adapun pemilihan lokasi tersebut dikarenakan peneliti telah melakukan observasi awal dengan meninjau bagaimana keadaan Dinas Sosial dan menemukan fenomena seperti kurangnya koordinasi dari Dinas Sosial dalam melakukan penertiban karena berdasarkan pendapat dari Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pekanbaru mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk menertibkan gepeng tersebut.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana evaluasi kebijakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan ketertiban sosial terutama pada permasalahan gelandangan dan pengemis. Peneliti telah mengidentifikasi permasalahan yang ada dan untuk mengembangkannya menjadi suatu penelitian maka dari itu peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan.

Adapun penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai tidak terlaksananya dengan baik tentang pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial terhadap masyarakat, adapun pelaksanaan yang tidak berfungsi dengan baik yaitu pelayanan kesejahteraan sosial yang bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi serta pengembangan. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mengakibatkan tidak maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial terhadap gelandangan tersebut. Hal ini dibuktikan dari jumlah gelandangan di Kota Pekanbaru yang menjadi peserta didik pada Dinas Sosial dan Pemakaman hanya berjumlah 10 orang. Sedangkan jumlah anak jalanan di Kota Pekanbaru pada tahun 2017 berjumlah 283 orang. Kemudian terdapat kurangnya koordinasi dari Dinas Sosial dalam melakukan penertiban karena berdasarkan pendapat dari Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pekanbaru mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk menertibkan gepeng tersebut.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru hanya menindaklanjuti dan memberikan pembinaan dan selanjutnya mereka dikirim ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan antara lain berupa keterampilan untuk membuka usaha mandiri agar tidak lagi kembali ke jalan. Jadi, Kurangnya keterlibatan instansi lainnya seperti Satpol PP, Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA), aparat kepolisian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masing-masing memiliki peran penting dalam menertibkan keberadaan gepeng di Pekanbaru.

Berikut ini penjelasan terkait tentang usaha yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai salah satu bentuk tindakan responsivitas yang diberikan: 1. Usaha represif, yaitu adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan lembaga dengan maksud untuk menghilangkan pergelandangan dan pengemis serta mencegah meluasnya di masyarakat. Usaha represif ini bertujuan untuk mengurangi dan /atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemis. Usaha represif ini dilakukan dengan cara: a. Razia b. Penampungan sementara untuk diseleksi c. Setelah gelandangan tersebut dirazia dan diseleksi, maka tindakan selanjutnya adalah: a) Dilepaskan dengan syarat b) Dimasukkan dalam panti sosial c) Dikembalikan kepada keluarganya d) Diserahkan ke Pengadilan e) Diberikan pelayanan Kesehatan f) Pelimpahan ke Pengadilan

2. Usaha rehabilitative, usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah masyarakat, pengawasan serta bimbingan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara RI. Usaha rehabilitatif ini bertujuan agar fungsi mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat. Usaha rehabilitatif ini dilakukan dengan usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, dan tindak lanjut, yang kesemuanya itu dilaksanakan melalui Panti Sosial.

3. Larangan memberi uang kepada gelandangan, mendukung upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis, maka dikeluarkanlah suatu kebijakan yaitu tentang larangan memberi uang kepada gelandangan dan pengemis.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn (2003:29) yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, responsivitas dan ketepatan dan kemudian dijadikan sebagai tolak ukur dalam evaluasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan ketertiban sosial. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui pada indikator efektivitas masih terdapat terjadinya pelanggaran bagi setiap orang yang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan atau di tempat-tempat umum.

Peneliti berasumsi bahwa masih terjadinya pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang, yaitu bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan atau di tempat-tempat umum adalah karena habis modal usaha sebagai bentuk penyantunan.

Kemudian yang memberi juga dikenakan sanksi. Seharusnya pemberi sumbangan memberikan ketempatnya, seperti penyaluran ke badan-badan amal, rumah zakat, dan sebagainya. Seharusnya orang-orang tersebut memberikan dananya ketempatnya, karena membahayakan kesehatan dan keselamatan bagi pemberi dan penerima.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui tindakan dari masyarakat yang mengetahui seseorang memberikan sumbangan dalam bentuk uang dan barang kepada gelandangan dan pengemis sudah terlaksana dengan baik. Tindakan yang seharusnya dari masyarakat apabila memiliki niat untuk memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis adalah menyalurkannya kerumah zakat.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian diketahui tindakan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru kepada orang dan atau mengorganisir gelandangan dan pengemis serta mengeksploitasi mereka yang bertujuan mencari keuntungan materi dengan memanfaatkan mereka ditanggapi cukup baik oleh responden. Tindakan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru kepada orang atau kelompok orang yang melakukan usaha penampungan, membentuk dan atau mengorganisir gelandangan dan pengemis serta mengeksploitasi mereka yang bertujuan mencari keuntungan materi semata dengan memanfaatkan mereka adalah dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru kepada orang atau kelompok orang yang menggunakan, menyediakan tempat untuk digunakan sebagai tempat penampungan gelandangan dan pengemis, oleh para responden diberikan tanggapan yang baik. Tindakan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru kepada orang atau kelompok orang yang menggunakan, menyediakan tempat/bangunan rumah/pertokoan/perkantoran untuk digunakan sebagai tempat penampungan gelandangan dan pengemis adalah menyerahkannya kepada pihak yang berwajib karena tidak menjadi kewenangan Dinas Sosial.

Tindak lanjut razia terhadap gelandangan dan pengemis dan anak yang mempunyai masalah dijalan, khususnya dalam hal pembinaan dan pelatihan baik non panti maupun panti sosial milik Pemerintah Daerah atau Panti Swasta atau pengembalian bagi mereka yang berasal dari luar Kota Pekanbaru, ditanggapi dengan cukup baik oleh para responden. Tindak lanjut razia terhadap gelandangan dan pengemis dan anak yang mempunyai masalah dijalan, khususnya dalam hal pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun panti sosial milik Pemerintah Daerah dan panti swasta atau pengembalian bagi mereka yang berasal dari luar Kota Pekanbaru dikembalikan ke kota asal sementara gelandangan dan pengemis yang berada dalam Kota Pekanbaru dipantau terus perkembangannya.

Menurut Sutaat (2012:63) keterbatasan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas perlu peningkatan sehingga dalam pelaksanaan tugas pelayanan rehabilitasi sosial sistem balai dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis. Kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melakukan pembinaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis masih belum maksimal karena itu Dinas Sosial hanya mendata dan memberikan penyuluhan dengan teknik non panti sambil menunggu pembangunan panti sosial selasa dikerjakan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui kelarasan antara aturan yang mengenai Pemerintahan Daerah wajib menyediakan panti sosial yang mempunyai program dalam bidang pelayanan rehabilitasi dan pemberian bimbingan keterampilan (workshop) bagi gelandangan dan pengemis sehingga mereka dapat mandiri dan tidak kembali mengelandang dan mengemis dengan kenyataan yang terjadi dilapangan saat ini sudah terlaksana dengan baik.

Ketika ditanya apakah ada program pembinaan terhadap gepeng yang tertangkap razia, beliau menyebutkan bahwa program pembinaan keterampilan untuk para gepeng sudah dilaksanakan gepeng setiap tahunnya. Mengingat anggaran untuk pembinaan keterampilan gepeng setiap tahunnya minim, pihak Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mengaku membatasi pesertanya. Biasanya peserta keterampilan diikuti 20 peserta berkurang jadi sepuluh peserta saja. Gambaran permasalahan ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Keselarasan antara aturan yang mengenai Pemerintah Daerah wajib menyediakan panti sosial yang mempunyai program dalam bidang pelayanan rehabilitasi dan pemberian bimbingan keterampilan (workshop) bagi gelandangan dan pengemis sehingga mereka dapat mandiri dan tidak kembali menggelandang dan mengemis dengan kenyataan yang terjadi dilapangan saat ini adalah dinas belum memiliki workshop, sehingga hal ini merupakan salah satu masalah dari Dinas Sosial. Hal ini juga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.

Menurut Pasolong (2010:204) responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenai kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjukkan pada kelarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karna responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan dengan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan birokrasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kerja yang jelek pula.

Tindakan preventif terhadap gelandangan dan pengemis dan anak yang mempunyai masalah dijalan adalah dengan cara melakukan penyuluhan, sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial yang berasal dari APBN. Dari kota dapat penyuluhan tindakan preventif dan semua bidang tindakan pencegahan oleh Petugas Sosial Masyarakat (PSM) dan juga dengan cara pendamping melalui keluarga.

Diketahui responsivitas mengenai pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru bagi gelandangan dan pengemis yang dilakukan penertiban oleh Satpol PP adalah sudah terlaksana dengan cukup baik, tindakan respesif dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap gelandangan dan pengemis dan anak yang mempunyai masalah dijalan adalah melakukan kerjasama dengan Tim Penertiban (Satpol PP) untuk pembinaan pendataan, sosialisasi dan pembinaan dengan non panti.

Berdasarkan hasil penelitian,apa yang sudah ditemukan dilapangan mengenai pelayanan yang diberikan Dinas Sosial terhadap masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial tentang penertiban Gelandangan dan Pengemis belum sepenuhnya berhasil di tanganani dengan baik, karena masih banyak kita temukan gelandangan dan pengemis di jalan raya dan di berbagai fasilitas umum, gelandangan dan pengemis ini tidak takut dengan razia yang dilakukan oleh Sat Pol pp malahan mereka melakukan berbagai cara untuk mendapatkan perhatian masyarakat agar mereka dikasihani sehingga mereka mendapat keuntungan yang sangat besar.

Upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menangani Gelandangan dan Pengemis yaitu dengan cara memberikan sanksi tegas bagi masyarakat yang kedapatan memberi uang kepada Gelandangan dan pengemis. Selanjutnya Gelandangan dan Pengemis yang sudah di razia seharusnya ditindak lanjuti dan diberikan binaan serta pengawasan sampai mereka mempunyai skill untuk bekal bagi mereka dalam mencari pekerjaan yang layak bagi hidupnya.

Tenaga personil yang kurang untuk penanganan gelandangan dan pengemis yang belum berfungsi dengan tepat pada sasaran serta biaya untuk pembangunan panti sosial yang belum tersedia. Masih banyaknya masyarakat yang masih memberikan uang dijalan kepada gelandangan dan pengemis, dengan alasan mereka merasa kasihan dan tidak sanggup melihat orang kesusahan dan kelaparan. Selanjutnya kurangnya sarana dan prasana yang mendukung kegiatan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan mengenai evaluasi kebijakan dinas sosial dalam melaksanakan ketertiban sosial di Kota Pekanbaru bahwa Razia yang di laksanakan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP belum sepenuhnya berjalan dengan baik, ini sesuai dengan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan, razia seharusnya dapat dilakukan untuk meminimalisir gelandangan dan pengemis di kota ini. Pelaksanaan razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP belum berjalan dengan efektif, dan ini sesuai dengan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dilapangan karena seharusnya razia yang dilakukan dapat meminimalisir gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Binaan untuk gelandangan dan pengemis merupakan tidak lanjut razia, yang di koordinasikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melakukan pelatihan, pembinaan untuk gelandangan dan pengemis baik yang tinggal di panti maupun panti sosial milik Pemerintah daerah juga mereka yang berasal dari luar kota pekanbaru. Binaan diberikan oleh Dinas Sosial tidak sepenuhnya efektif karena tidak adanya tindak lanjut dari pelatihan tersebut.

Terdapat keterbatasan dari pihak Panti Sosial Kota Pekanbaru yang masih sulit untuk menjangkau mengenai tenaga dan tempat yang disediakan sehingga bekal-bekal keterampilan yang seharusnya diterima oleh gelandangan dan pengemis yang direhabilitasi tersebut tidak dapat terpenuhi sehingga kebijakan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak terlaksana.

Adapun saran yang akan diberikan terkait pada penelitian ini antara lain sebagai berikut: 1. Agar dapat memberikan pelajaran barudalam ilmu pengetahuan, terutamadi dalam bidang ilmu pemerintahan yang jugabisa dipergunakan sebagai sumber bacaan dan pedoman bagi kegiatan penelitian selanjutnya. 2. Agar dapat dijadikan referensi bagi penelitian lain yang ingin mengangkat topik yang sama terkait permasalahan mengenai evaluasi kebijakan. 3. Agar dapat memberi masukan bagi dinas dan instansi terkait mengenai evaluasi kebijakan dalam menanggulangi permasalahan gelandangan dan pengemis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agustino, Leo 2012. Dasar-Dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta

- Awang, Azam, 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Pustaka Pelajar
- Awang, Azam dan Mendra Wijaya, 2012. Ekologi Pemerintahan. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Badudu, Zaen, 2001. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bidin, Said Zainal, 2002. Kebijakan Publik Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Dunn, N William, 2003. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Balai Pustaka.
- Edwar, George III, 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
- Gustino, Leo, 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabetha.
- Hadari Nawawi, 2006. Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hanim, Sufian dan Adnan, Indra, M, 2005. Organisasi dan Manajemen. Pekanbaru: Multi Grafindo.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2008. Akuntabilitas Birokrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kansil, CST, dan Cristine, 2003. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Ndraha, Taliziduhu, 2011. Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant, 2006. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif, 2005. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.
- Nurman, dkk, 2009. Buku Pedoman Penulisan. Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
- Nawawi, Hadi, 2011. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Rasyid, M. Ryass, 1997. Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta: PT. Yasrif Watampone.
- Rahardjo, Adisasmita, 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Subarsono, 2009. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasinya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, Purwa, 2004. Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Sedarmayanti, 2004. Good Governance (Kepemerintahan yang baik). Bandung: Mandar Maju.
- Suharsimi, Arikunto, 2004. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2005. Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta: Bumi Aksara.

- Syafiie, Inu Kencana, 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. Sulistiyani, Ambar, T, 2011. Memahami Good Governance. Yogyakarta : Gava Media.
- Sumaryadi, L. Nyoman, 2005. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama.
- Supriyatno, Budi, 2009. Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategi). Tangerang: CV Media Brilian.
- Suryabrata, Sumadi, 2010. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Winarno, Budi. 2007. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. Pengantar Analisis Kebijakanaksanaan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.

B. Jurnal

- Adriansyah, Muhammad. 2017. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Kasus Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru). JOM FISIP Volume 4 Nomor 1 Februari, 2017.
- di Keamatan, M. P. N. S., & Hulu, S. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa.
- Wicaksono, A. (2022, April). Peatlands Restoration Policies in Indonesia: Success or Failure?. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 995, No. 1, p. 012068). IOP Publishing.
- Yogia, A. S. M. A., Rahman, Z. M. D. W. K., & Purwati, A. A. (2021). Leadership of Tourism and Culture Department in Development of Cultural Reserves at District Kuantan Singingi.
- Subhayano, T., Yogya, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating the Administration of Peace and Order in Pangkalan Kerinci District Pelalawan Regency.
- Yogia, A. I. M. A., Wedayanti, Z. M. D., & Purwati, A. A. (2021). The Role of Organizational Culture on Employee Satisfaction and Performance.
- Yuza, A. F. (2014). Policy Dynamics on Subdistricts and Various Post-Reformation Implications.
- Munir, A., Wahyudi, S., & Zainal, Z. (2020). Tinjauan Kriminologi Terhadap Sensual Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Produk Yang Diperankan Oleh Sales Promotion Girl Di Kota Pekanbaru. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 6(2), 21-35.
- Rajasa, Y. (2021). Good Governance In Structure Belantik Raya People's Market In Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 11(2), 1-11.
- Ispik, A., Yogya, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Influence of Discipline on Performance of Employees Office of the Ministry of Religion. *Pekanbaru City*.

- Doni, D., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Purwati, A. A. (2021, February). The Effect of Leadership and Incentives on Employee Performance of Market Retribution. In *2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020)* (pp. 167-171). Atlantis Press.
- Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., & Riau, M. A. I. Media dan Politik.
- Riau, M. A. I. (2012). Studi Komparatif Aktivitas Humas Antara Pemerintah Provinsi Riau dengan PT. *Chevron Pacific Indonesia. Medium*, 1(1).
- Riau, M. A. I. (2016). Figur Politik Calon Walikota Pekanbaru Septina Primawati Rusli dan Erizal Muluk Pada Pemilukada Kota Pekanbaru 2011. *Medium*, 4(2).
- Riau, M. A. I. (2013). Penggunaan Teknologi Komunikasi dalam Penerapan Good Governance. *Jurnal Kajian Pemerintahan*, 2(2), 102-107.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riau, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Riau, M. A. I., & Shasrini, T. (2017). Dampak Komunikasi Terapeutik terhadap Citra Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru). *Jurnal The Messenger*, 9(1), 31-43.
- Sari, G. G., Wirman, W., & Riau, M. A. (2018). Pergeseran Makna Tradisi Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Riau, M. A., Sari, G. G., Aslinda, C., & Qurniawati, E. F. (2018). Konstruksi Makna Ketergantungan dalam Perilaku Merokok. *RELASI NEGARA INDUSTRI DAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI*, 171.
- Riau, M. A. I., Kholil, S., & Sikumbang, A. T. (2019). Islamic Symbols on Political Messages in Newspapers in Riau (Study in Regional Head Election 2017). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 2(1), 254-262.
- Riau, M. A. I., & Sari, G. G. (2018). Konsep Diri Perokok di Universitas Islam Riau. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 6(2), 27-38.

C. Skripsi, Tesis dan Disertasi

- Hasyim, Budi Muhammad. 2018. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru. Skripsi. Universitas Islam Riau.